

ABSTRAK

Doni Mutaqin (043971): Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Studi Deskriptif Analitis Di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung)

Reformasi yang terjadi mulai tahun 1998 telah membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 memberikan perubahan dalam warna ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Salah satu pasal yang mendapat perhatian adalah pasal 18 UUD 1945 yang berkaitan dengan masalah Pemerintah Daerah.

Tuntutan untuk dapat menjalankan otonomi daerah sangat besar. Dorongan yang kuat ini melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dengan adanya jaminan konstitusi yang dijelaskan lebih lanjut dalam UU dan PP diharapkan otonomi yang diberikan kepada daerah tidak setengah-setengah melainkan otonomi dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Desa sebagai wilayah terkecil dalam susunan hierarkis pemerintahan Indonesia juga memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan yang dimiliki oleh desa diantaranya adalah kewenangan devolutif sebagai bagian dari desentralisasi politik. Penyusunan Peraturan Desa merupakan bagian dari kewenangan devolutif. Proses penyusunannya dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu penulis meneliti mekanisme penyusunan Perdes di Desa Neglasari menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Neglasari telah konstitusional dalam melaksanakan penyusunan Perdes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, namun Pemerintah Desa Neglasari tidak menguasai PP tersebut karena sosialisasi terhadap PP tersebut sangat minim dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Ditemukan pula kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Neglasari dalam proses penyusunan Perdes seperti masalah waktu penyusunan, masalah kesibukan anggota BPD, dan masalah optimalisasi dari tujuan diterapkannya Perdes terutama menyangkut masalah udunan (istilah iuran di Desa Neglasari). Kendala-kendala tersebut terus dikaji dan diusahakan jalan keluarnya oleh Pemerintahan Desa Neglasari dengan harapan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarokaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Dzat Illahi Rabbi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan kenikmatan luar biasa tiada henti-hentinya. Atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Studi Deskriptif Analitis Di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung)".

Skripsi ini mengupas tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa khususnya di Desa Neglasari. Dijelaskan pula bagaimana Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang terdapat di dalam Pemerintahan Desa. Kemudian bagaimana Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Penyusunan Peraturan Desa. Dalam penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penyusunan peraturan desa di Desa Neglasari ini penulis menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa serta berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut.

Di Tingkat Pemerintahan Desa ini penulis menemukan berbagai kendala yang menyebabkan kurang efektif nya Peraturan Pemerintah tersebut dalam penerapan proses demokrasi ditingkat Pemerintahan Desa khususnya di Desa Neglasari serta berbagai masalah lain yang timbul akibat dari berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa khususnya dalam hal penyusunan Peraturan Desa ditingkat Pemerintahan Desa di Desa Neglasari.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sifat sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan berbagai masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Lebih jauh penulis mengharapkan adanya insan akademis lain yang berusaha melakukan penelitian lebih dalam mengenai Pemerintahan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya sehingga keilmuan yang dihasilkan terus bertambah.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan segala kebaikan semua dibalas oleh Allah SWT. Amin!

Bandung, November 2009

Doni Mutaqin

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji dan sukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam melakukan pengerjanya skripsi ini tidak mungkin mampu terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang membantu. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Eni Supiani (Ibunda tersayang) yang tiada hentinya menengadahkan kedua tangan seraya menuturkan untaian mutiara do'a diiringi cucuran air mata dan senyuman untuk kesuksesan ananda. Sodikin Herdis (Ayahanda tercinta) yang tiada lelah membanting tulang dan mencururkan keringat senantiasa memberikan dukungan materil, meski hujan-panas-sakit tidak dijadikan halangan dalam menyokong nafkah keluarga.
2. Bapak Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar SH., M.Pd. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Dadang Sundawa M.Pd.. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dekan FPIPS beserta staf TU yang telah membantu memberikan fasilitas selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Rahmat M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan selama menyelesaikan studi di UPI.
6. Ibu Dra. Iim Siti Masyitoh M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama menyelesaikan studi di UPI.
7. Ibu dan Bapak Dosen UPI yang telah memberikan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis, serta para guru yang telah mendidik penulis semoga apa yang telah diberikan menjadi amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah SWT dunia dan akhirat. Amin.
8. Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis, serta Pemerintah Desa Neglasari dan BPD Desa Neglasari yang telah membantu penulis memberikan informasi yang penulis perlukan selama penelitian, terutama kepada Bapak Yana Suharna selaku Sekertaris Desa yang telah banyak membantu penulis.
9. Saudaraku Ramdhan M (Adik), yang selalu mendukung penulis dalam melewati dan menjalani kehidupan di keluarga selama ini.
10. Keluarga besar Mahasiswa PKn angkatan 2004, khususnya kepada Galung (sahabat yang selalu ada), Taopik Rohman (teman yang membantu memberi semangat), Bambang Aryanto (Saksi hidup perjalananku), M. Arobi, Madroji Suud, Wahyu perdana Kusumah, Margi wahono, yudha Pradana, Kosasih adi, Asep Dahliana, Radea A B, Edah, Winda, kartika, Rima R, dan teman – teman lainnya terima kasih atas pengalamannya serta atas kebersamaannya selama menjalani kuliah di kampus UPI .

11. Keluarga Besar Mahasiswa Pecinta Alam Civics Hukum (MAPACH) yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Khususnya buat kepengurusan sekarang Epin (Pres), Arif Kadat, Gian, Hendry, Stone, Nisha C A, Astri, Tiwi, Rini, Cici, Lena, Noval. Terima kasih buat kalian semua, tetap semangat, jaga kekompakan, dan belajar yang rajin.

12. Para Senior MAPACH yang selalu mendukung setiap perjuangan di organisasi, Agus Babad, Alex abules, Devi Adriana, Cecep Risdianto, Usep Saepurohman, Muhamad Ramdhani, Muhamad Ari F, Deni Wahyudin, Yudha Prahara, dan para senior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semangat selalu , salam MAPACH.

13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Civics Hukum (HMCH) yang tak henti-hentinya memberikan kritik dan masukan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu atas segala jasa yang telah diberikan baik yang disadari maupun yang tidak disadari selama penulis menjalani masa-masa perkuliahan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarokaatuh.

Bandung, November 2009

Doni Mutaqin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Subjek dan Lokasi Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah	13
1. Sistem Desentralisasi pada Masa Kekuasaan Kolonial Belanda	16
2. Sistem Desentralisasi pada Masa Pendudukan Jepang	17
3. Sistem Desentralisasi pada Masa Orde Lama	18
4. Sistem Desentralisasi pada Masa Orde Baru	21
5. Sistem Desentralisasi pada Masa Reformasi Sampai Saat Ini	24
B. Tinjauan Tentang Desa	30
1. Desa dan Masyarakat Pedesaan	30
2. Penjelasan Desa Menurut Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa	31
3. Pemerintahan Desa	33
C. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Desa	36
1. Otonomi Desa	36
2. Penetapan Peraturan Desa	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian	43
B. Teknik Pengumpulan Data	45
C. Subjek dan Lokasi Penelitian	46
D. Tahap-Tahap Penelitian	46
E. Pertanyaan Penelitian	48

1. Bagaimana Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Neglasari dan Apakah Telah Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku?.....	48
2. Bagaimana Sosialisasi Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005?	49
3. Kendala-Kendala Apakah yang Muncul dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Neglasari.....	50
4. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Pemerintah Desa maupun BPD Desa Neglasari untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Muncul dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa?.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pemerintah Desa Neglasari.....	52
B. Deskripsi Hasil Penelitian	56
1. Proses Penyusunan Peraturan Desa	56
a. Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.....	56
b. Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.....	60
c. Proses Penetapan Peraturan Desa dan Pelaksanaannya.	61
d. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa	62
2. Sosialisasi Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa	63
a. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa	63
b. Pengetahuan Pemerintah Desa Terhadap Isi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.....	64
3. Kendala-Kendala yang Dihadapi Saat Menyusun Peraturan Desa.....	65
4. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang Muncul Saat Penyusunan Peraturan Desa.....	66
C. Analisis Hasil Penelitian.....	67
1. Analisis Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Neglasari	67
2. Analisis Sosialisasi Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005	73
3. Analisis Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Neglasari.....	74
4. Analisis Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang Terjadi	76
D. Pembahasan Hasil Penelitian	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

2.1	Undang-undang Sistem Desentralisasi yang pernah berlaku pada masa orde lama	19
2.2	Undang-undang Sistem Desentralisasi yang pernah berlaku pada masa orde baru	22
4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Neglasari	55

